

Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014

Yulion Zalpha

Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: yulion.zalpa@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar tahun 2014. Konflik ini bermula karena kekuasaan Pemerintah bersama Golkarnya yang mengarah pada totaliterisme, menghadirkan kekecewaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 9-11 Juli 1998 Golkar menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebagai usaha membenahi kelembagaan Golkar, yang kemudian dinamai 'Partai Golkar'. Dalam munaslub tersebut, terpilih Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar. Dengan demikian, eksistensi Partai Golkar tetap berlanjut, meskipun terdapat beberapa perubahan dasar seperti dalam visi dan misinya, yaitu: terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar, dan responsif. Bila dikaji dari segi tipologi, kelembagaan, atau pun analisis konflik yang terjadi pada Partai Golkar. Maka hal itu mencerminkan pragmatisme partai politik di Indonesia.

Abstract

This article examines the internal conflicts that occurred in the Golkar Party in 2014. This conflict started because the power of the Government and the Golkar which led to totalitarianism, bring disappointment in society. Therefore, on 9-11 July 1998 Golkar held a outstanding national conference (munaslub) as efforts to reform the institutional Golkar, which was then called 'the Golkar Party'. In the munaslub, was elected Akbar Tandjung as chairman of Golkar party. Thus, the existence of the Golkar Party still continues, although some basic changes such as in the vision and mission, that is: an open, independent, democratic, moderate, deep-rooted, and responsive. When examined in terms of typology, institutional, or analysis of the conflict in the Golkar Party. Then it reflects the pragmatism of political parties in Indonesia.

Keywords: Conflict, Party, Golkar

Tulisan ini mengkaji lebih jauh konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai beringin (Golkar) pasca pilpres 2014. Sebelumnya dua partai lain, yaitu partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyajikan konflik internal di tubuh partai masing-masing dan mencuat ke publik. Sebagai sebuah organisasi, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap partai mempunyai dinamika dan permasalahan internal. Partai yang mempunyai dimensi kesisteman dan pelebagaan yang kuat akan lebih “matang” dalam mengatasi konflik yang terjadi di internal.

Konflik yang terjadi di internal partai GOLKAR antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono yang terjadi belakangan ini merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Bagaimana tidak, sebagai salah satu partai lama yang telah banyak mengalami pasang-surut dalam panggung politik nasional dianggap lebih matang dibanding partai-partai lain, akan tetapi yang terjadi konflik internal tersebut semakin memanas dan tidak bisa diredam sehingga muncul ke permukaan dan menjadi “santapan” publik. Pada dasarnya konflik internal di partai Golkar bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi selama ini konflik yang terjadi masih mampu dikelola secara manis dan dewasa, Golkar mampu menyembunyikan konflik dan mengelolanya secara matang.

Apa yang terjadi di internal partai Golkar menimbulkan pertanyaan besar mengapa sebagai partai yang besar dan “matang” Golkar tidak mampu menyelesaikan konflik internal secara dewasa dan elegan, bahkan harus terjadi kekerasan fisik dalam konflik tersebut, hal ini jelas-jelas sebagai sebuah “penyimpangan” dan kejadian yang tidak lazim dalam budaya politik Golkar. Tulisan ini akan melihat konflik internal Golkar dengan melihat beberapa aspek diantaranya tipologi partai, pelambagaan partai, dan analisa konflik.

Tipologi (Golkar dari Masa ke Masa)

Partai Golkar berdiri sejak tahun 1962 yang pada awalnya merupakan sebuah perkumpulan yang terdiri dari gerakan pelajar, cendekiawan, militer, dan puluhan organisasi kekartayaaan yang bersatu atas nama Sekber Golkar akibat disahkannya Perpru Nomor 193/1964 yang mengharuskan organisasi-organisasi di bawah naungan Front Nasional harus bergabung dan berafiliasi menjadi partai politik.¹ Sekber Golkar pada awalnya bertujuan untuk mengimbangi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mendesak kekuasaan presiden Soekarno untuk lengser dengan dalih pemberian akses bagi militer memasuki panggung politik tidak ada. Usaha Golkar berhasil mengambil alih pemerintahan dan juga

menjadi partai politik pemerintah itu sendiri yang mana militer merupakan kekuatan yang dominan di dalamnya. Dengan kata lain, Golkar pada masa Orde Baru menjadi alat pemerintah sekaligus memiliki kekuasaan mengatur perpolitikan di Indonesia dalam arti pengimplementasian demokrasi ‘Pancasila’ (katanya).²

Kekuasaan Pemerintah bersama Golkarnya yang mengarah pada totaliterisme menghadirkan kekecewaan dalam masyarakat sehingga melahirkan babak baru perpolitikan di Indonesia dengan nama ‘reformasi’. Akibatnya, kekuasaan Soeharto ‘mau tidak mau’ harus dilengserkan dan salah satu tuntutan masyarakat adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya.³ Dengan kata lain, Golkar yang menjadi salah satu bagian yang melanggengkan kekuasaan Soeharto nasibnya di ujung tanduk. Artinya, Golkar juga mendapat tekanan yang kuat dari masyarakat, misalnya; pelarangan Golkar dalam Pemilihan Umum 1998, bahkan menyeruhkan Golkar untuk dibubarkan. Oleh karena itu, pada tanggal 9-11 Juli 1998 Golkar menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebagai usaha membenahi kelembagaan Golkar yang kemudian dinamai ‘Partai Golkar’. Dalam munaslub tersebut, terpilih Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar mengalahkan Edi Sudrajad –yang kemudian mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sebelum diselenggarakannya pemilu tahun 2004. Dengan demikian, eksistensi Partai Golkar tetap berlanjut meskipun terdapat beberapa perubahan dasar seperti dalam visi dan misinya, yaitu: terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar, dan responsif.⁴ Alhasil, perolehan suara Partai Golkar yang digadang-gadang menurun justru dengan konsisten menduduki posisi tiga besar dalam empat pemilu yang digelar pascareformasi, yaitu: tahun 1999, 2004, 2009, dan tahun 2014.⁵

Hasil yang diperoleh oleh Partai Golkar secara awam cukup mengejutkan karena prediksi miring yang meramalkan bahwa Partai Golkar akan karam sepenuhnya tidak terbukti. Kemungkinan besar yang menyebabkan Partai Golkar tidak ‘collapse’ adalah model pengorganisasian Partai Golkar itu sendiri yang dapat dikatakan kuat dan stabil. Oleh karena itu, muncul pertanyaan berkaitan tentang Partai Golkar ini, yaitu: sebenarnya masuk dalam kategori apakah Partai Golkar tersebut? Dalam hal ini, beberapa teori dapat dihubungkan dengan dengan Partai Golkar. Adapun teori tentang pengkategorian partai yang dapat dilihat melalui basis Partai Golkar itu sendiri. *Pertama*, komposisi dan fungsi keanggotaan. Partai Golkar jika dikategorikan sebagai partai dikatatorial atau totaliter boleh jadi sepenuhnya dapat dibenarkan.⁶ Hal ini dikarenakan di dalam Partai Golkar memiliki ideologi yang kuat, yaitu ideologi yang ‘seolah-olah’ atau

mengatasnamakan nasionalisme. Ciri utama yang dapat diperlihatkan adalah bahwa pemimpin tertinggi atau ketua partai memiliki wewenang untuk mengontrol anggotanya, dan rekrutmen anggotanya bersifat selektif dengan pengujian kesetiaan dan komitmennya terhadap partai. Oleh karena itu, setiap anggota partai dituntut pengabdian total terhadap Partai Golkar. Untuk konteks ke kinian model totaliter agaknya tidak sepenuhnya relevan atau sangat relevan pada saat Partai Golkar era Orde Baru dengan Soeharto dan deretan jenderal yang mengorganisir partai, sehingga untuk menghubungkan ke kinian Partai Golkar berada di posisi medium antara partai massa dengan partai kader, atau disebut sebagai partai *catch-all*.

Partai *catch-all* menurut Otto Kirchhimer adalah partai yang bertujuan untuk memenangkan pemilu dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti terhadap ideologi yang kaku.⁷ Pengertian tersebut dapat disederhanakan dengan mengatakan bahwa Partai Golkar tidak sepenuhnya meninggalkan usaha pengkaderan massa secara intelektual dan moral, juga tidak sepenuhnya menggerakkan atau memobilisasi massa sebagai kekuatan politisnya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Sebab, di satu sisi organisasi sayap dari Partai Golkar tetap eksis menggembleng setiap anggota-anggotanya baik dalam organisasi maupun setiap kegiatannya yang bertujuan untuk menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut. Misalnya, dengan jalan mengadakan penyaringan terhadap calon anggota dan bahkan memecat anggota yang menyeleweng dari garis-garis ketentuan partai Golkar. Sementara itu, pengkaderan di dalam Partai Golkar sendiri melalui organisasi Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB), Barisan Nasional (Barnas), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan lain-lainnya yang menjaring anggota baik kalangan intelektual, pengusaha, cendekiawan, dan sebagainya.⁸

Di sisi lain, Partai Golkar juga tidak luput menghadirkan dukungan dari massa pemilih sebanyak mungkin sebagai tolok ukur kesuksesan atau kegagalan sebuah partai tidak terkecuali untuk Partai Golkar. Hal ini dikarenakan, keyakinan yang dipercayai bahwa semakin banyak massa yang datang di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Golkar, maka secara otomatis baik elit partai, anggota, simpatisan, maupun masyarakat secara umum dibuat yakin bahwa Partai Golkar memiliki prospek untuk memenangkan pemilu. Selain itu, Partai Golkar juga memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai partai massa karena anggota, simpatisan, dan lainnya berasal dari masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tingkat

pendidikannya minim dan ekonominya tidak stabil. Partai Golkar dapat tumbuh dan berkembang dalam situasi masyarakat yang demikian entah kebetulan atau tidak masyarakat Indonesia ‘seolah-olah’ masih merindukan sosok Soeharto sebagai pemimpin karismatik. Dengan kata lain, segmen massa pemilih kelas menengah ke bawah Partai Golkar masih dipengaruhi oleh sosok pemimpin karismatik atau sebagai ‘ratu adil’.⁹

Untuk menyentuh segmen pemilih semua kelas masyarakat, Partai Golkar yang sekarang memanfaatkan media sebagai sarana sosialisasi politiknya. Hal ini dikarenakan, Partai Golkar nampaknya berusaha mengurangi kemungkinan munculnya kembali pemimpin otoriter yang berlindung di balik karisma masa lalu sehingga Partai Golkar mengonstruksikan diri sebagai partai media yang menemukan kebenaran atau lebih tepatnya kehendak pemilih melalui riset lapangan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Partai Golkar di media ‘seolah-olah’ dan ‘memang benar’ berasal dari rakyat –sekadar mengingatkan pula jargon Partai Golkar kini, yaitu: “suara Golkar suara rakyat.” Alhasil, Partai Golkar kemudian tidak akan pernah kehilangan sumber inspirasi dan kreasi karena berasal langsung dari pikiran dan hati masyarakat.

Konsepsi partai media itu sendiri menurut Wolfgang C. Mueller melibatkan kerja sama antara partai politik, konsultan kampanye (biro iklan), dan media massa itu sendiri.¹⁰ Konsep tersebut sedikit demi sedikit merubah Partai Golkar dari partai massa model lama yang mengutamakan sisi *output* (penampilan Partai Golkar di depan umum). Oleh karena itu, konsep partai media dari sisi *inputnya* (masukan) berupa persepsi dan harapan pemilih terhadap Partai Golkar digali dan dijaring untuk memperbaiki sisi *outputnya*. Dalam arti ini, penampilan Partai Golkar menjadi lebih tajam dan berakar ditinjau dari hati dan pikiran pemilih sehingga Partai Golkar untuk menggiring massa tidak harus bersusah payah mencari dan menambah anggota partai dikarenakan pertunjukkan politik hadir di rumah melalui media cetak maupun media elektronik sehingga masyarakat ‘seolah-olah’ datang sendiri ke Partai Golkar.

Partai Golkar di masa Orde Baru sangat diuntungkan sebagai partai resmi pemerintah yang memperoleh akses tak terbatas terhadap media tetapi berbeda pascareformasi yang mana Partai Golkar tidak diuntungkan. Permasalahan tersebut bukan lagi menjadi persoalan ketika di tahun 2007 Aburizal Bakrie (ARB) yang kala itu menjabat sebagai menteri kordinator kesejahteraan rakyat (menko kesra) yang juga kader Partai Golkar membeli stasiun televisi TV One dan ANTV (serta

kepemilikan atas Vivanews). Hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi Partai Golkar dan ARB khususnya dalam perjalanan Partai Golkar sebagai partai media.

Pergeseran pola Partai Golkar yang tidak sepenuhnya sebagai partai kader dan juga partai massa atau yang sebelumnya disebut sebagai partai *catch-all* dapat diamini. Namun demikian, tujuan sempit dari partai *catch-all* yang hanya berusaha memenangkan pemilu jika dikontekskan dengan Partai Golkar sekarang agaknya hanya menakut-nakuti pelbagai segmen masyarakat yang sebenarnya berpotensi menjadi pengikut dan pendukung partai. Oleh karena itu, terdapat tambahan lain terkait pengategorian *catch-all*, yaitu keberadaan atau eksistensi dari Partai Golkar sebagai partai besar sebelum dan sesudah reformasi menjadi syarat menjadi partai *catch-all*. Umumnya, partai besar tidak memiliki keterbatasan pengaruh dalam menjangkau masyarakat bahkan di wilayah terpencil sekalipun. Kemungkinan besar Partai Golkar dapat bertahan adalah tidak mengesampingkan dampak yang luas bukan dalam analogi ‘apabila tugas telah usai, maka usai pula tanggungjawab yang diemban oleh partai’ sehingga Partai Golkar tetap bertahan dan berumur panjang.

Keberadaan Partai Golkar juga merupakan sebuah usaha untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan publik yang menghendaki perubahan yang lebih demokratis. Dengan kata lain, Partai Golkar cenderung menyesuaikan diri dengan pesaingnya karena mengharapkan keuntungan atau takut kalah dalam pemilihan dengan dukungan massa dan media untuk mengatrolnya. Partai Golkar dalam hal ini tidak melupakan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan sarana pembuatan kebijakan publik.¹¹ Oleh karena itu, Partai Golkar ‘seolah-olah’ memperlihatkan bahwa terjadi penguatan kelompok-kelompok elit yang keberhasilan dan kegagalannya kini dinilai dari sumbangannya terhadap keseluruhan sistem sosial, bukan lagi ketaatannya terhadap tujuan-tujuan organisasi –lihat elit Partai Golkar yang menduduki posisi penting di pemerintahan, baik yang duduk di kursi eksekutif maupun legislatifnya yang tentunya bukan hitungan jari lagi.

Partai Golkar juga menunjukkan indikasi bahwa telah terjadi pengurangan anggota partai yang dimaksudkan untuk anggota yang dianggap tidak loyal terhadap partai atau bersinggungan dengan kehendak partai. Kemudian, Partai Golkar menyentuh pada kelas sosial tertentu atau pengikut agama tertentu yang digunakan sebagai basis partai dalam merekrut pemilih dalam masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Partai Golkar juga melakukan pembinaan akses ke pelbagai kelompok kepentingan yang digunakan sebagai modal pengorganisasian

Partai Golkar dan akses lainnya, seperti ‘proyek’, atau sebagainya. Dengan demikian, pengertian Partai Golkar sebagai partai *catch-all* dengan kombinasi sejumlah faktor hasilnya tetap mengarah kepada upaya perolehan suara sebanyak mungkin dalam pemilu sehingga keberadaan Partai Golkar tetap memiliki pengaruh baik di masyarakat maupun di kursi panas parlemen.

Kedua, klasifikasi Partai Golkar dapat dilihat dari segi sifat dan orientasi partai. Jika mengontekskan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh partai *catch-all*, Partai Golkar dapat dikategorikan sebagai partai idiologi atau partai azas jika pilihan yang disodorkan selain menjadi partai perlindungan atau partai *patronage*. Menurut Miriam Budiardjo, partai idiologi mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan partai bersifat mengikat sehingga seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perekrutan anggota juga harus melalui tahapan tertentu.¹² Namun, partai idiologi yang Partai Golkar perlihatkan bukan idiologi yang benar-benar ‘nasionalis’ sepenuhnya. Artinya, idiologi ‘nasionalis’ atau beridiologi ‘Pancasila’ seperti dalam Pasal 5 AD Partai Golkar sesungguhnya adalah cara pandang sisa Orde Baru yang menganggap bahwa Pancasila dsebagai sebagai sesuatu yang sakral, tetapi pada kenyataannya segala kebijakan dan tindakan Partai Golkar sama sekali tidak menunjukkan apilkasi dari idiologi ‘Pancasila’ tersebut sehingga dalam hal ini layak apabila menyebut Partai Golkar sebagai ‘*pseudo-ideology party*’. Alhasil, yang nampak kini adalah aktivitas Partai Golkar mengarah pada kecenderungan politik pragmatis seperti halnya dalam perebutan pengaruh dan kursi kepemimpinan di Partai Golkar yang kini sudah menelurkan beberapa partai baru seperti Partai Keadilan dan Persatuan yang kini bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Edi Sudrajad), Partai Karya Peduli Bangsa (R. Hartono), Partai Hanura (Wiranto), Partai Gerindra (Prabowo Subianto), dan Partai Nasional Demokrat (Surya Paloh).

Tidak mengherankan apabila muncul partai-partai baru yang lahir dari tubuh Golkar karena politik pasif yang dimainkannya. Partai Golkar seperti diketahui memiliki banyak faksi-faksi karena Partai Golkar tidak memiliki tokoh sentral yang kuat sehingga usaha merebut kursi kepemimpinan dijadikan sebagai arena politik pragmatis yang pertama dilakukan. Dengan kata lain, Partai Golkar belum menghilangkan sepenuhnya citra sebagai partai penguasa Orde Baru yang hanya digunakan sebagai kendaraan politik semata apabila masyarakat jeli melihatnya. Dengan demikian, ideologi sebenarnya digunakan oleh Partai Golkar adalah idiologi liberal.

Kelembagaan Partai Golkar

Partai Golkar ketika Orde Baru menunjukkan ketergantungannya terhadap pemerintah, begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan, semua stasiun televisi baik pemerintah dan swasta menayangkan program-program politik pemerintah sehingga menghindari pemberitaan bernuansa oposisi. Oleh karena itu, partai politik yang lainnya tidak memiliki akses berhubungan dengan masyarakatnya. Dengan kata lain, terlihat bagaimana Partai Golkar pada saat itu tidak memiliki kemandirian karena sosok Soeharto ‘seolah-olah’ menjadi pemeran utama sebagai pengikat pelbagai faksi di tubuh Golkar. Fenomena yang muncul adalah Partai Golkar tidak mampu mempertahankan keutuhan organisasinya. Dengan kata lain, Partai Golkar belum memiliki persiapan ketika suatu saat ditinggalkan tokoh-tokoh seniornya seperti Sarwono Kusuma Atmadja, Tri Sutrisno, dan lainnya.

Fenomena ditinggalkan oleh panutan partai ‘seolah-olah’ mengindikasikan bahwa Partai Golkar hanya menjadi kendaraan politik semata. Partai Golkar telah memberi naungan, ganjaran, dan kemewahan hidup bagi tokoh-tokoh tersebut nyatanya tidak memiliki pengaruh apa-apa. Sebab, Partai Golkar tidak lagi dipandang bermanfaat sehingga dapat ditinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, Partai Golkar apabila terus membiarkan kecenderungan itu terus berlanjut bukan mustahil akan membawa kehancuran bagi Partai Golkar sendiri. Menurut Huntington, setiap organisasi apabila tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya maka organisasi tersebut akan berhenti berkembang.¹³ Alhasil, Partai Golkar melakukan usaha sistemik untuk menghentikannya.

Usaha Partai Golkar selain mengadakan munaslub adalah menjadikan Partai Golkar sebagai partai tengah. Hal ini dikarenakan, aturan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia memaksakan partai-partai harus berkoalisi dalam merebut mayoritas suara. Dalam situasi tersebut Partai Golkar menempatkan diri pada spektrum ideologis yang memungkinkan dapat bekerjasama dengan semua partai baik kiri (nasionalis) dan partai kanan (agamis). Dengan menempatkan diri pada posisi partai tengah, maka Partai Golkar dapat menghindari tekanan kehancuran. Seperti contoh, dalam pemilu 1999 Partai Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan, di Pemilu 2004 Partai Golkar berkoalisi dengan PKB, di tahun 2009 Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Hanura, dan di pemilu 2014 berkoalisi dengan KMP bersama Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, PD, dan PBB.

Langkah yang ditempuh oleh Partai Golkar tersebut jika dikontekskan dengan teori pelembagaan partai politik Vicky Randall dan Lars Svavand menjadi

sangat relevan. Sebab, kelembagaan suatu partai dalam hal ini Partai Golkar dapat dilacak melalui dinamika internal partai, dan keberagaman kepentingan aktor di dalam organisasi partai sebagai tempat analisa sehingga dapat dikatakan bahwa pelebagaan partai politik ini menjadi cerminan bagaimana partai politik bertindak dalam upaya menyentuh persoalan-persoalan dalam organisasi partai. Oleh karena itu, dapat diperoleh asumsi bahwa pelbagai permasalahan dapat diketahui langsung menuju pada sumbernya.¹⁴ Kemudian, jika melihat tingkatan pengorganisasian partai politik juga sejajar sebagai akibat keberagaman konteks yang dihadapi oleh partai.

Adapun proses pelebagaan partai politik menurut Randall dan Svasand melalui empat tahapan. *Pertama*, derajat kesisteman. Dalam hal ini Partai Golkar meskipun telah lolos ET memiliki derajat kesisteman yang rendah. Sebab, struktur organisasi Partai Golkar sangat sentralistik –yaitu anak cabang ditentukan oleh cabang, cabang ditentukan oleh daerah/wilayah, dan daerah/wilayah ditentukan oleh pusat/DPP.¹⁵ Kemudian, anggota Partai Golkar yang duduk dikursi parlemen juga tidak dapat menolak keputusan partai sehingga kiprah parlemen menjadi tidak otonom –parlemen sekarang yang menempatkan Partai Golkar sebagai bagian KMP menjadikan setiap anggota fraksi Golkar mau tidak mau harus menjalankan keputusan DPP Golkar misalnya dalam pengesahan RUU Pilkada Tidak Langsung di mana suara dari fraksi Partai Golkar menyetujuinya.

Dalam mengukur derajat kesisteman Partai Golkar juga dapat dilihat dari kepemimpinan partai yang bersifat oligarki karena keputusan politik yang dibuat lebih dominan ditentukan oleh pemimpin partai yang seharusnya dibuat secara kolektif oleh para petinggi partai/DPP. Dengan kata lain, struktur organisasi dari Partai Golkar masih bersifat hierarkis sehingga akan berdampak buruk apabila DPP hanya digunakan untuk melegitimasi kepentingan pengurus partai khususnya bagi pemimpin yang menggunakan citranya untuk melanggengkan dominasinya atas Partai Golkar –lihat Aburizal Bakrie yang secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Golkar dalam munas Bali yang nampak ‘seolah-olah’ didukung penuh oleh seluruh DPC dan DPW. Namun demikian, model hierarkis ini juga dapat berdampak positif bagi Partai Golkar apabila DPP lebih berperan sebagai penegak konstitusi partai akan tetapi DPP Golkar tidak menunjukkan sikap demikian. Oleh karena itu, Partai Golkar belum dapat dikatakan terlebaga dengan baik karena belum mampu menunjukkan suatu contoh pengaplikasian AD/ART yang demokratis.

Kedua, identitas nilai.¹⁶ *Ketiga*, derajat otonomi. Dalam derajat otonomi ini yaitu dalam hal pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), dengan sumber dana (pengusaha, pemerintah, negara atau lembaga luar), maupun dengan sumber dukungan massa (masyarakat) sehingga dapat membentuk relasi ketergantungan, saling tergantung, maupun jaringan. Oleh karena itu, partai politik dapat dikatakan sudah melembaga apabila keputusannya tidak dipengaruhi oleh pihak luar partai baik sekadar konsultasi dengan mitra atau jaringan pendukung partai. Sementara itu, hubungan Partai Golkar dengan penguasa pada masa Orde Baru adalah hubungan ketergantungan, yaitu keputusan Golkar ditentukan oleh presiden untuk tingkat nasional, gubernur untuk tingkat provinsi, dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Sedangkan, hubungan Golkar dengan unsur ABRI (jalur A), birokrasi (jalur B), dan Golkar non-ABRI dan non-Birokrasi (Jalur C) merupakan hubungan saling tergantung. Hubungan Golkar dengan organisasi sayapnya seperti AMPI adalah hubungan jaringan.¹⁷

Relasi Partai Golkar yang sekarang ini memiliki sedikit perbedaan dengan Golkar sebelumnya, yaitu berhubungan dengan pengusaha sebagai penyandang dana partai baik sebagai pendukung mobilitas dan juga informasi untuk—lihat para pengusaha yang memiliki jabatan strategis di dalam Partai Golkar juga di pemerintahan. Selain itu juga Partai Golkar mendapat sokongan dananya dari APBN dan APBD melalui jalur resmi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat sokongan dana APBN dan APBD tidak resmi karena tidak sedikit anggota Partai Golkar yang tersandung masalah korupsi.¹⁸ Sedangkan, hubungan partai Golkar dengan organisasi sayapnya tetap idem, yaitu hubungan jaringan yang memberikan dukungan. Dengan kata lain, hubungan ketergantungan yang dibangun dulu dengan ABRI kini ‘seolah-olah’ berganti dengan pengusaha, dan hubungan saling tergantung ditunjukkan oleh kader-kader partai yang menduduki posisi strategis di pemerintahan dengan Partai Golkar itu sendiri. Oleh karena itu, hubungan yang dimaksudkan dalam mengukur derajat otonomi suatu partai ditunjukkan Partai Golkar dengan menciptakan relasi yang tidak hanya pendanaan semata, tetapi juga jaringan perkaderan dan informasi sebagai penggerak mesin partai.

Keempat, citra publik. Citra publik partai politik merupakan dimensi yang menghubungkan pemilih dan partai politik. Identifikasi diri dengan partai (*partyID*) dapat dikatakan sebagai perasaan seorang manusia bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya, Dengan kata lain, seseorang tersebut mengidentikkan

diri sebagai orang partai tertentu, atau bahwa seseorang merasa dekat dengan partai politik tertentu. Misalnya: Saya orang Golkar, saya merasa dekat dengan Partai Golkar, dan seterusnya. PartyID ini merupakan komponen psikologis yang memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian, dan pada akhirnya memperkuat demokrasi itu sendiri.

Citra publik juga dapat dilihat dari intermediasi partai atau evaluasi kelompok pemilih sejauh mana partai politik dirasakan berfungsi menghubungkan kepentingan kelompok pemilih dengan keputusan-keputusan publik yang bakal dibuat dalam regulasi di parlemen ataupun keputusan pemerintah. Bila evaluasi ini sebagian besar negatif, maka fungsi intermediasi itu lemah, dan sebaliknya fungsi tersebut kuat. Menurut Biorcio dan Mannheim citra publik ini termanivestasi ke dalam empat wujud, yaitu: sekutu, terasing, loyal, dan paragmatis.¹⁹

Keempat wujud dalam teori citra publik Biorcio dan Mannheim jika dikontekskan dengan Partai Golkar agaknya memenuhi setiap aspeknya. Hal ini dikarenakan, kondisi perpolitikan di Indonesia menunjukkan perilaku elit politik partai tak terkecuali di tubuh Partai Golkar dalam keseluruhan proses pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu pilkada seharusnya menjadi acuan penting dalam pembentukan perilaku politik warga negara. Sebab, referensi politik warga negara dapat terlihat dari situasi politik yang nyata. Perilaku politik elit partai dan keseluruhan proses politik di partai seringkali tidak demokratis yaitu, dalam proses rekrutmen politik dan penggantian pengurus justru ditandai oleh adanya konflik, persengkokolan politik, dan lebih buruk lagi politik uang. Padahal, pemilu secara signifikan akan membentuk citra partai politik, birokrasi, politisi, dan badan perwakilan. Oleh karena itu, menjadi sebuah kritik bahan pembelajaran juga buat Partai Golkar dalam proses politiknya dengan lebih objektif dan transparan sehingga membentuk sikap-sikap dan kepercayaan politik yang relevan bagi masyarakat.

Partai Golkar dikatakan memenuhi keempat aspek teori citra publik ini karena, pertama: sekutu. Hubungan antara Partai Golkar dan kelompok pemilih memenuhi dua dimensi (emosional dan rasionalitas). Hubungan antara dua belah pihak sangat kuat dan positif. Implikasinya, pemilih menjadi optimis dan partai politik menjadi berakar dan karena itu menjadi kuat yang mana diketahuibahwa Partai Golkar juga merupakan partai lama dan besar. *Kedua*, dalam hubungan loyal antara partai dan kelompok pemilih hanya bersandar pada hubungan emosional. Dimensi rasionalitas atau intermediasinya lemah atau tidak ada.

Kemungkinan besar membantu stabilitas dukungan pada partai meskipun partai tidak berfungsi bagi kepentingan pemilih. Dalam tipe ini, elit partai mempunyai pengaruh sangat kuat tanpa kontrol berarti dari pemilih yang dapat dilihat dari banyaknya tokoh Partai Golkar yang berasal dari pelbagai kalangan dan memiliki pengaruh dan dukungan yang kuat di daerahnya masing-masing. *Ketiga*, hubungan terasing di mana emosional maupun rasional antara pemilih dan partai lemah atau bahkan tidak ada. Partai adalah sesuatu yang asing bagi kelompok pemilih, dan partai tidak dirasakan gunanya oleh mereka. Tipe hubungan ini paling buruk bagi partai, bagi sistem kepartaian, dan bagi demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang masih menjadi golongan putih (golput), atau disebut juga sebagai massa mengambang. Bila tipe ini merupakan kekuatan mayoritas, menjadi ancaman nyata bagi partai, sistem kepartaian, dan demokrasi perwakilan.

Keempat, hubungan pragmatis antara kelompok pemilih dan partai yang ditandai oleh hadir atau kuatnya fungsi intermediasi partai. Di tingkat pemilih partai dirasakan menjadi penghubung kepentingan mereka dengan keputusan-keputusan politik yang dibuat di parlemen ataupun eksekutif. Namun demikian, hubungan tersebut tidak disertai loyalitas terhadap partai politik. Mereka mendukung partai sejauh partai tersebut berfungsi untuk menjembatani kepentingan mereka. Bila kepentingan tersebut tak dimediasi maka pemilih meninggalkan partai tersebut. Karena dalam prakteknya tidak mudah peran intermediasi ini dimainkan oleh partai, dan tidak mudah semua kepentingan pemilih diakomodasi, maka pola hubungan pragmatis ini cenderung cair, mudah berubah, dan karena itu tidak mudah bagi stabilnya dukungan terhadap partai, bagi stabilitas sistem kepartaian, dan bagi stabilitas demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh Partai Golkar yang sekarang masih dipimpin oleh ARB dan masih tersandung kasus lumpur Lapindo bahkan tidak memiliki nilai jual untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden pada pemilu 2014 silam. Padahal Partai Golkar menjadi pemenang kedua setelah PDI Perjuangan. Hal ini dikarenakan sosok ARB yang sebelumnya menjadi menko kesra dan juga Partai Golkar itu sendiri tidak berusaha mengagregasikan kepentingan masyarakat di Sidoarjo, meskipun pemerintah pusat pada akhirnya menjembatani pelunasan ganti-rugi kepada masyarakat.

Analisis Konflik yang Terjadi pada Munas Golkar

Partai Golkar di penghujung tahun 2014 menampilkan drama menarik, yaitu: diselenggarakannya dua munas ke-9. Munas pertama diselenggarakan di Bali

pada tanggal 30 Nopember-3 Desember yang menghasilkan keputusan bahwa Aburizal Bakrie kembali ditunjuk menjadi ketua umum secara aklamasi. Sedangkan, munas kedua diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5-7 Desember dengan keputusan menolak hasil munas di Bali karena dinilai tidak sesuai AD/ART Partai Golkar di mana pemilihan ketua umum dipilih secara demokratis. Perselisihan tersebut juga memunculkan dua kubu yang berseteru, yaitu: kubu munas Bali yang diketuai oleh ARB itu sendiri, sementara kubu munas Jakarta diketuai oleh Agung Laksono.

Adanya perselisihan ditubuh Partai Golkar ini jika dikontekskan dengan teorinya Timothy J. Power sangat relevan. Hal ini dikarenakan, pertumbuhan dan perkembangan sistem multipartai melalui dua tahapan utama, dan Partai Golkar telah melewati tahap pertama sebagai tahap permulaan yang mana dihitung sejak reformasi yang rentang waktunya sudah melewati 5-10 tahun sehingga Partai Golkar menempati tahapan kedua, yaitu: pelibatan pelembagaan partai dalam memperkuat partai itu sendiri.²⁰ Oleh karena itu, adanya konflik atau perbedaan pendapat di tubuh Partai Golkar merupakan salah satu dinamikanya.

Partai Golkar yang kini berkonflik juga sebenarnya sedang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan internalnya sendiri dan juga sedang diuji apakah mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelembagaan konflik. Artinya, pelembagaan konflik yang dimaksudkan adalah partai politik tidak terkecuali Partai Golkar merupakan wadah konflik, peserta konflik, dan bertugas menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, Partai Golkar dalam hal ini seharusnya mampu mengatur dan menyelesaikan konflik di dalam tubuhnya sendiri, baru kemudian bersaing dengan partai lain sebagai peserta konflik dengan *fair*, dan berusaha menyelesaikan konflik dalam masyarakat.²¹

Kekisruhan dalam Partai Golkar diawali oleh adanya perbedaan pendapat masing-masing elit Partai Golkar yang nampaknya 'seolah-olah' membuat Partai Golkar goyah dan menjurus kepada perpecahan. Terjadinya konflik tidak jauh berbeda dengan urusan kepengurusan atau jabatan tertinggi di Partai Golkar yang diperebutkan sebagai arena konflik. Namun demikian, kesadaran bahwa Partai Golkar juga merupakan lembaga konflik inilah yang belum muncul sehingga menghadirkan munas ganda dengan klaimnya masing-masing. Oleh karena itu, Partai Golkar belum menemukan titik temu ataupun konsensus di antara pelbagai kelompok/golongan yang memperjuangkan kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini konflik internal yang terjadi juga akibat dari aturan yang ditetapkan oleh AD/ART Partai Golkar itu sendiri belum terlembaga dengan sempurna. Dengan

kata lain, spekulasi yang kemudian berkembang adalah bagaimana suatu partai politik belum dapat menyelesaikan konflik internalnya hendak mengurus permasalahan/konflik di masyarakat yang begitu luas, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal?

Setidaknya kedua kubu yang berkonflik sudah memiliki iktikat baik untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Desember 2014. Di pihak ARB diwakili oleh M.S. Hidayat dan Sharif Cicip Sutardjo, sementara di kubu Agung Laksono diwakili oleh Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Andi Matalatta, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Ibnu Munzir. Dalam kesempatan tersebut dibahas tentang upaya rekonsiliasi yang dinilai sesuai visi dan misi Partai Golkar. Oleh karena itu apabila upaya initerus berlanjut bukan mustahil kedua kubu yang berbeda pendapat ini akan berdamai. Namun demikian, dalam pertemuan kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Januari 2015 akan dibahas topik menarik terkait posisi Partai Golkar di KMP juga permasalahan RUU Pilkada yang sudah disahkan. Hal ini dikarenakan, kubu Agung Laksono disamping mengkritik pemilihan ARB yang tidak demokratis juga permasalahan posisi Golkar itu sendiri sehingga Partai Golkar 'seolah-olah' hendak meninggalkan KMP dengan alasan bahwa posisi Partai Golkar pascareformasi selalu berada di posisi koalisi dengan pemerintah.

Posisi Partai Golkar dalam koalisi ini dapat dikategorikan sebagai "*minimal winning coalition*" yang mana prinsip dasar dari koalisi ini adalah maksimalisasi kekuasaan atau sebanyak mungkin memperoleh kursi di parlemen dan mengabaikan partai yang tidak perlu. Oleh karena itu, koalisi Partai Golkar dalam KMP adalah dibentuk tanpa memperdulikan posisi partai dan ideologi yang dianutnya. Dengan kata lain, koalisi tersebut adalah wujud bagaimana partai politik hanya berkuat pada rebut kekuasaan dan apabila kalah jegal kekuasaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kinerja di parlemen justru sedikit menghambat kinerja pemerintahan sekarang hingga waktunya reses masih juga belum memberikan sumbangsi apa-apa sehingga kubu Agung merasa tidak nyaman dengan situasi semacam itu.

Permasalahan koalisi ini jika dipahami dengan baik tidak hanya melulu berkuat pada rebut, raih, dan jegal kekuasaan semata. Namun demikian, koalisi itu pada hakikatnya merupakan cermin langsung dari keberagaman masyarakat Indonesia yang memang masih terbelah dengan nilai primordialnya. Oleh karena itu, koalisi itu hadir untuk menjembatannya. Menurut Arend Lipjhart, adanya koalisi ini akan diperoleh konsensus atau musyawarah yang mencerminkan

kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan sistem demokrasi.²² Dengan kata lain, dengan membangun koalisi bersama KMP ini seharusnya Partai Golkar mampu mengembangkan naluri kerjasama yang juga harus didasari oleh pertimbangan strategis berupa nilai-nilai yang diperjuangkan partai untuk konstituennya.

Kesimpulan

Konflik internal yang tengah terjadi ditubuh Partai Golkar adalah upaya pendewasaan partai sehingga permasalahan yang ada bukanlah untuk mencari kubu siapa yang paling benar apabila Partai Golkar meminta bantuan dari luar untuk menjembatani permasalahan tersebut yang dalam hal ini adalah kementerian hukum dan HAM. Atau, penyelesaian konflik yang ditempuh adalah upaya untuk menyongsong pilkada tidak langsung yang diselenggarakan serentak beberapa bulan yang akan datang. Dengan kata lain, Partai Golkar yang dilihat dari segi tipologi, kelembagaan, atau pun analisis konfliknya mencerminkan pragmatisme partai politik di Indonesia.

Perilaku politik elit partai Golkar dan keseluruhan proses politik di partai ini seringkali tidak demokratis yaitu, dalam proses rekrutmen politik dan penggantian pengurus justru ditandai oleh adanya konflik, persengkokolan politik, dan politik uang. Padahal, pemilu secara signifikan akan membentuk citra partai politik, birokrasi, politisi, dan badan perwakilan. Oleh karena itu, menjadi sebuah kritik bahan pembelajaran juga buat Partai Golkar dalam proses politiknya dengan lebih objektif dan transparan. Sehingga membentuk sikap-sikap dan kepercayaan politik yang relevan bagi masyarakat.

Endnote

¹ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 13-14

² Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Tansisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 39-40

³ Sebetulnya terdapat 6 tuntutan reformasi, yaitu: 1) penegakan supremasi hukum; 2) pemberantasan KKN; 3) mengadili Soeharto dan krooni-kroninya; 4) amandemen UUD 1945; 5) pencabutan dwifungsi ABRI; 6) pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

⁴ Aulia Rachman, *Citra Khalayak tentang Golkar: Peta Permasalahan Menjelang Kemenangan Pemilu 2004*, (Jakarta: PSAP, 2006), hlm. 2-3.

⁵ Perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 1999, yaitu 23.741.758 suara atau sekitar 22,44%. Sedangkan, dalam pemilu 2004 suara Partai Golkar, yaitu: 24.480.757 (21,58%). Pada pemilu 2009 suara Partai Golkar mencapai 5.037.757 (14,45%), dan pada pemilu 2014 suaranya 14,30%. Yudho Rahardjo, Perolehan Suara Golkar di Tiga Pemilu, Vivanews, April 11, 2014, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/496072>.

⁶ Ichlasul Amal (editor), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hlm. xv

⁷ *Ibid.*, hlm. xvii

⁸ Andreas Pandiagan, *Menggugat Kemandirian Golkar*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), hlm. 205-209

⁹ Tidak mengherankan apabila dikomparasikan dengan massa pemilih dari PDI Perjuangan dengan sosok Megawati Soekarnoputri yang identik dengan sosok presiden Soekarno. Bambang Cipto, *Partai Kekuasaan dan Militer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 4.

¹⁰ Wolfgang C. Mueller, "Inside the Black Box: A Confrontation of Party Behavior and Theories of Party Organizational Change," *Jurnal Party Politics Vol. 3 Nomor 3* (1997), hlm. 307-308

¹¹ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1977), hlm. 55-58

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 166-167

¹³ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (New Haven: Yale University Press, 1968), hlm. 98

¹⁴ Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies," *Jurnal Party Politics Vol. 8 Nomor 1* (2002), hlm. 5-29

¹⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 110-111

¹⁶ Identitas nilai berkaitan dengan ideologi Partai Golkar yang dapat dikatakan liberal

¹⁷ Andy Ramses dan La Bakry (editor), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: MIPI, 2009), hlm. 147

¹⁸ Adapun kader Partai Golkar yang tersandung kasus korupsi ialah Jonaidi Syahri (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma Periode 2009-2014), Rusli Zainal (Gubernur Riau), M. Akil Mochtar (Ketua MK), Chairun Nisa (Anggota DPR 2009-2014), M. Faisal

Aswan (anggota DPRD Provinsi Riau), TB Aat Syafaat (Walikota Cilegon Periode 2005-2010), Amran Batalipu (Bupati Buol), Jefferson SM Rumajar (Walikota Tomohon), Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara), dan lain sebagainya. Zuhidayat Siregar, Berikut Nama-Nama Kader Golkar, PDIP dan PD yang Korup, Rmol, Maret 10, 2014, <http://www.rmol.co/read/2014/03/10/146796/>.

¹⁹ R. Biorcio dan R. Mannheimer, “*Relationship Between Citizens and Political Parties*” dalam H. D Klingemann dan D. Fuchs, *Citizens and State* (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 206-226

²⁰ Timothy J. Power, “Parties, Puppets, and Paradoxes: Chancing Attitudes Toward Party Institutionalization in Post-Authoritarian Brazil,” *Jurnal Party Politics Vol.3* (1997), hlm. 207-208

²¹ Andy Ramses dan La Bakry (editor), *Politik dan Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: MIPI, 2009), hlm. 140-141.

²² Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Concensus Government in Twenty-One Countries*, (New Haven dan London: Yale University Press, 1984), hlm. 48-49

Daftar Pustaka

- Amal, Ichlasul (editor). (1988). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budiardjo, Miriam. (1997). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, Bambang. (2000). *Partai Kekuasaan dan Militer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuchs, H. D. Klingemann dan D. (1995). *Citizens and State*. Oxford: Oxford University Press.
- Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Kantaprawira, Rusadi. (1977). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- La Bakry, Andy Ramses. (editor). (2009). *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: MIPI.
- Lijphart, Arend. (1984). *Democracies: Patterns of Majoritarian and Concensus Government in Twenty-One Countries*. New Haven dan London: Yale University Press.

-
- Mueller, Wolfgang C. (1997). "Inside the Black Box: A Confrontation of Party Behavior and Theories of Party Organizational Change." *Jurnal Party Politics Vol. 3 Nomor 3*.
- Pandiagan, Andreas. (1996). *Menggugat Kemandirian Golkar*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.
- Power, Timothy J. (1997). "Parties, Puppets, and Paradoxes: Chancing Attitudes Toward Party Institutionalization in Post-Authoritarian Brazil." *Jurnal Party Politics Vol.3*.
- Rachman, Aulia. (2006). *Citra Khalayak tentang Golkar: Peta Permasalahan Menjelang Kemenangan Pemilu 2004*. Jakarta: PSAP.
- Rahardjo, Yudho. *Perolehan Suara Golkar di Tiga Pemilu*. April 11, 2014. <http://politik.news.viva.co.id/news/read/496072> (accessed Desember 29, 2014).
- Siregar, Zulhidayat. *Berikut Nama-Nama Kader Golkar, PDIP dan PD yang Korup*. Maret 10, 2014. <http://www.rmol.co/read/2014/03/10/146796/> (accessed Desember 29, 2014).
- Suryadinata, Leo. (1992). *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Svasand, Vicky Randall dan Lars. (2002). "Party Institutionalization in New Democracies." *Jurnal Party Politics Vol. 8 Nomor 1*.
- Tandjung, Akbar. (2007). *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.